

Pembelahan Politik Kiai NU di Pilgub Jatim 2018

Ainur Rohim¹
Mayuko Galuh Mahardika²

Abstract

The realm of East Java politics which has been known as the main community of Traditional Islam, bequeaths a separate record of the dynamics and political maneuvers of NU strategic elites (Kiai) in the context of 2018 East Java Pilgub. Similar political realities have occurred since the East Java Pilgub in 2008 and 2013 . One thing that is most useful and more in several perspectives is the change in political division among the NU East Java kiai in the 2018 Pilgub. Things that happened also in the East Java Pilgub 2008 and 2013 ago. The writing of this journal is preceded by the existence of research with qualitative methods with primary data collection through interviews with people who understand this case study and also supported by secondary data. The author will analyze the phenomena that occur with the cleavage theory described by Peter Mair (2014).

Keywords: *Election of East Java Governor, Nahdlatul Ulama*

Abstrak

Ranah politik Jatim yang selama ini dikenal sebagai kandang utama komunitas Islam Tradisional (Nahdlatul Ulama/NU) di jagat politik nasional, mewariskan catatan tersendiri tentang dinamika dan manuver politik elit-elit strategis NU (Kiai) dalam konteks Pilgub Jatim 2018. Realitas politik serupa terjadi sejak Pilgub Jatim secara langsung pada 2008 dan 2013 lalu. Satu catatan penting yang layak dipahami lebih mendalam dan komprehensif dalam beberapa perspektif adalah terjadinya pembelahan politik di kalangan kiai NU Jatim pada Pilgub 2018. Hal serupa terjadi pula di Pilgub Jatim 2008 dan 2013 lalu. Penulisan jurnal ini didahului dengan adanya penelitian dengan metode kualitatif dengan pengambilan data primer melalui wawancara terhadap orang-orang yang memahami study kasus ini dan juga didukung dengan data sekunder. Penulis melakukan analisa fenomena yang terjadi dengan teori pembelahan yang diuraikan oleh peter mair (2014).

Kata Kunci: *Pilgub Jatim, Nahdlatul Ulama*

¹ Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga

² Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga

PENDAHULUAN

Satu fenomena menarik di Pilgub Jatim 2018 adalah bertemunya dua kader terbaik NU sebagai kandidat gubernur Jatim. Keduanya adalah Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang selama hampir 10 tahun terakhir ini menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Jatim dan Khofifah Indar Parawansa (Khofifah), Ketua Umum PP Muslimat NU dan pernah menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres M Jusuf Kalla (JK). Pilgub Jatim 2018 menjadi pertemuan ketiga bagi Gus Ipul dan Khofifah dalam kontestasi politik tingkat regional. Otomatis tampilnya dua kader terbaik NU di ajang Pilgub Jatim 2018 mengakibatkan dinamika politik yang cenderung bergerak meninggi di internal NU, terutama di kalangan kiai pengasuh pondok pesantren (Ponpes), jamaah, dan jam'iyah NU secara kelembagaan. Terjadi pembelahan politik di internal kiai dan ponpes di lingkungan NU terkait politik dukung-mendukung pasangan cagub-cawagub

Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) belum lama tuntas digelar pada 27 Juni 2018 lalu. Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil E Dardak unggul atas pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarnoputra. Khofifah-Emil yang didukung Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) meraih dukungan 10.465.218 suara (53,55%), sedangkan Gus Ipul-Puti dengan 9.076.014 suara (46,45%). Gus Ipul-Puti didukung 4 partai politik: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pilgub Jatim 2018 berlangsung dengan total daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 30.155.719 pemilih, Jutaan pemilih ini tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim (Data

selengkapnya lihat tabel I), yang terbagi dalam 666 kecamatan, 8.497 kelurahan/desa, dan memberikan suaranya di 67.644 tempat pemungutan suara (TPS) (Sumber Data: KPU Jatim, 2018). Jumlah pemilih di Jatim ini terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat (Jabar). Sehingga dalam perspektif politik elektoral, ranah Jatim menjadi barometer penting kontestasi politik di level regional maupun nasional. Anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar Pilgub Jatim dan 18 Pilkada Kabupaten/Kota yang tempo pemungutan suaranya bersamaan dengan Pilgub Jatim mencapai Rp 817 miliar. Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, mengatakan, termin pertama anggaran Pilgub Jatim cair sebesar Rp 119 miliar pada bulan Juli 2017 dan sisanya termin kedua cair Rp 698 miliar pada Januari 2018. Total anggaran Pilgub Jatim 2018 sekitar Rp 1,2 triliun jika ditambah dengan anggaran keamanan yang dikelola Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya. (**beritajatim.com, 16 Juni 2017**).

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai komponen sosial penting dan bersifat strategis di Jatim memberikan warna khas dalam setiap kontestasi politik langsung, seperti Pilgub Jatim. NU dengan elit strategisnya yaitu kiai jadi determinan politik penting selain partai politik, ormas kemasyarakatan, media massa, intelektual, dan lainnya dalam dinamika politik Pilgub Jatim 2018.

Secara garis besar, Pilgub Jatim 2018 mengakibatkan munculnya dua poros besar kiai dan pondok NU terkait dengan politik dukung-mendukung cagub-cawagub. Pada Pilgub Jatim 2018, ada dua poros politik yang terbentuk. *Pertama*, Poros Tebuireng, mengacu pada Pondok Tebuireng Jombang yang dipimpin KH Salahuddin Wahid (Gus Solah). Poros ini mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil E Dardak. Tokoh sentral poros ini di antaranya Gus Solah dan KH Asep Syaifuddin Halim (Kiai Asep), pimpinan Pondok Amanatul Ummat, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. *Kedua*,

Poros Lirboyo, mengacu pada Pondok Lirboyo di Kota Kediri. Ada cukup banyak kiai NU yang berada di poros ini dan para kiai NU tersebut dikenal memiliki loyalitas tinggi mendukung Gus Ipul di bursa Pilgub Jatim. Mereka bukan sekadar mendukung Gus Ipul di Pilgub Jatim 2018, tapi juga pada Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Salah satu tokoh sentral poros ini adalah KH Anwar Manshur dari Pondok Lirboyo dan KH Anwar Iskandar, pimpinan Pondok Al Amin Jamsaren dan Ngasinan, Kota Kediri.

Sejumlah kiai sepuh NU yang tergabung dalam Poros Lirboyo, menjadi pendukung tulen Gus Ipul, antara lain, KH. Zainuddin Jazuli (Ponpes Ploso Kediri), KH. Anwar Manshur (Ponpes Lirboyo), KH Nurul Huda Jazuli (Ponpes Ploso, Kediri), KH. Miftahul Akhyar (Ponpes Miftahussunah Surabaya dan Wakil Rais Aam PBNU), KH Nawawi Abdul Jalil (Ponpes Sidogiri, Pasuruan), KH Agus Ali Masyhuri (Ponpes Bumi Sholawat Lebo, Sidoarjo), KH. Anwar Iskandar (Ponpes Al Amin, Kediri), KH. Mutawakkil Alallah (Ponpes Zainul Hasan Genggong, Probolinggo dan Ketua NU Jatim ketika Pilgub Jatim 2018 berlangsung), KH. Fuad Nur Hasan (Ponpes Sidogiri, Pasuruan), KH. Fuad Jazuli (Ponpes Ploso, Kediri), KH. Idris Hamid (Ponpes Salafiyah, Kota Pasuruan), KH. Abdullah Kafabihi (Ponpes Lirboyo, Kediri), KH. Cholil As'ad Samsul Arifin (Ponpes Walisongo, Situbondo), KH Fakhri Aschal (Ponpes Syaichona Cholil, Bangkalan), dan KH. Ubaidillah Faqih (Ponpes Langitan Tuban).

Tentu saja ada sejumlah argumentasi kenapa dukungan para kiai NU, khususnya kiai-kiai NU yang pernah mendukung pasangan Pakde Karwo-Gus Ipul di Pilgub Jatim 2008 dan 2013, sangat getol menyatakan dukungannya kepada Gus Ipul sebagai cagub Jatim di Pilgub 2018. KH Anwar Iskandar, juru bicara para kiai sepuh NU yang mendukung Gus Ipul, mengungkapkan sejumlah pertimbangan para kiai sepuh NU

mendukung Gus Ipul. Pertimbangan para kiai itu lantaran pengalaman Gus Ipul mendampingi Gubernur Soekarwo selama dua periode. Hal ini dinilai sebagai waktu yang cukup lama bagi Gus Ipul untuk belajar tentang Jatim. Selanjutnya, dari segi elektabilitas, nama Gus Ipul cukup tinggi elektabilitasnya saat ini menurut hasil survei beberapa lembaga survei kredibel dan independen. Latar belakang Gus Ipul sebagai kader NU yang lahir dari kalangan Nahdliyyin, membuatnya akrab dengan NU. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB) mengakui dorongan dari masyayikh (kiai) agar DPP merekomendasikan satu nama, yakni Gus Ipul, sebagai cagub Jatim 2018. Tampaknya semua kiai kompak dan sepakat dengan satu nama, yakni Saifullah Yusuf. Cak Imin mengaku tentu akan sami'na waato'na kepada para kiai. Pihaknya mengaku akan taat dan tunduk dengan perintah para ulama.

Di samping itu, KH Anwar Iskandar pada saat diwawancarai pada 4 Mei 2018 mengatakan bahwa pencalonan Gus Ipul sebagai cagub Jatim bisa dimaknai sebagai wujud keterlibatan dan pengaruh ulama/kiai di jalur politik. Kiai tak sekadar berjuang di jalur kultural. Yang tak kalah penting adalah kiai harus berjuang melalui jalur politik. Hal itu wujud dari pertanggungjawaban kiai terhadap bangsa, negara, dan umat. Antara politik dan agama tak mungkin dipisahkan. Amanat sejumlah kiai khos NU kepada Gus Ipul sebagai cagub itu dicantumkan dalam kontrak jam'iyah, yang berintikan pada 3 poin penting. Pertama, pencalonan Gus Ipul sebagai cagub Jatim yang kelak nanti jika terpilih harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Kedua, mampu mewujudkan clean and good government. Ketiga, mewujudkan masyarakat berkemajuan, khususnya masyarakat Islam di Jatim.

Sejumlah pertimbangan mengapa dukungan politik diberikan kepada Khofifah untuk tampil sebagai cagub Jatim di Pilgub 2018. Ini merupakan kali ketiga Khofifah maju dalam kontestasi Pilgub Jatim. Dukungan para kiai NU itu disampaikan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Khofifah di Pondok Tebuireng, Jombang, yang digelar sejak siang hingga petang, Minggu, 15 Oktober 2017. Usai pertemuan, juru bicara para kiai, KH Asep Saifudin Halim, mengungkapkan alasan para kiai mendukung Khofifah, karena kiai punya tanggung jawab terwujudnya tatanan kehidupan yang luhur. Sesungguhnya Allah SWT menitipkan bumi ini pada hamba-hamba-Nya yang soleh dan solehah. Khofifah dianggap memenuhi empat kriteria atau sifat seorang pemimpin sebagaimana ada pada diri Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Empat sifat itu antara lain siddiq (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan gagasan), fathonah (cerdas), dan amanah (bertanggung jawab). Dengan banyak pengalaman dan peran Khofifah baik di bidang keagamaan, sosial, politik, dan pemerintahan di tingkat nasional dan internasional, kapasitas dan kapabilitas Khofifah dinilai sangat mumpuni.

Tabel I: Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jatim 2018

No	Nama Kabupaten / Kota	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih
1	Pacitan	993	460.102
2	Ponorogo	1.731	753.356
3	Trenggalek	1.210	576.560
4	Tulungagung	1.840	844.818
5	Blitar	2.078	936.896
6	Kediri	2.594	1.188.565
7	Malang	4.178	1.966.373
8	Lumajang	1.872	812.479
9	Jember	4.427	1.810.220
10	Banyuwangi	2.830	1.257.684
11	Bondowoso	1.500	578.741
12	Situbondo	1.183	472.792
13	Probolinggo	1.700	845.901
14	Pasuruan	2.380	1.151.502
15	Sidoarjo	2.287	1.359.815
16	Mojokerto	1.719	811.959
17	Jombang	2.147	977.676
18	Nganjuk	2.079	848.657
19	Madiun	1.014	566.704
20	Magetan	1.296	532.853
21	Ngawi	1.551	699.567
22	Bojonegoro	2.408	1.026.229
23	Tuban	2.006	925.104
24	Lamongan	2.347	1.039.849
25	Gresik	2.210	900.962
26	Bangkalan	1.984	859.067
27	Sampang	1.450	803.499
28	Pamekasan	1.583	680.392
29	Sumenep	2.400	854.158
30	Kota Kediri	485	199.271
31	Kota Blitar	249	110.255
32	Kota Malang	1.400	600.646
33	Kota P Linggo	379	163.567
34	Kota P Suruan	310	139.508
35	Kota Mojokerto	219	96.132
36	Kota Madiun	310	149.026
37	Kota Surabaya	4.284	2.006.061
38	Kota Batu	411	148.773
	TOTAL	67.644	30.155.719

Sumber Data: KPU Provinsi Jatim (2018)

TEORI PEMBELAHAN POLITIK DAN ELITE NU

Bagaimana memotret dan memahami dukung-mendukung di kalangan kiai NU pada Pilgub Jatim 2018. Dalam tulisan ini, penulis mengajukan dua pisau analisis teoritis tentang fenomena politik di atas, yakni teori pembelahan politik dan teori elite. Peter Mair (2014), mengatakan, sebagian besar tulisan tentang pembelahan apakah mereka dipandang sebagai sosial, politik atau budaya cenderung mengabaikan perspektif yang dinamis. Seringkali pembelahan diperlakukan seolah-olah akibat alami dari stratifikasi sosial. Jika ada pembagian dalam masyarakat, inilah yang dilihat untuk menjelaskan keberadaan partai dan politik. Dan jika kemudian keberadaan ini kemudian berubah sedemikian rupa sehingga garis-garis stratifikasi lama memudar dan yang baru muncul menggantikan mereka, ini pasti menyebabkan tenggelamnya satu partai dan muncul serta tumbuhnya partai lain.

Dalam pendekatan baru, pembelahan politik diasumsikan sesuatu tentang sistem kepercayaan, dengan pembagian struktural sosial tradisional seperti kelas dan agama tampaknya terkikis, dan digantikan sesuatu yang dibangun hampir secara eksklusif pada preferensi, pola pikir, dan nilai (Lihat khususnya Flanagan, 1987; Ingleharg, 1990; Kriese, 1998). Pembelahan mungkin ada dalam masyarakat, dan ini, selanjutnya mungkin berhubungan dengan nilai-nilai atau identitas tertentu, tapi ini tidak mesti berarti bahwa ini semua relevan secara politik. Ini adalah poin utama yang digarisbawahi Sartori (1990) mengacu pada pentingnya penerjemahan dan persuasi serta juga poin yang dibuat Schattschneider (1983, 69) ketika ia berbicara tentang beberapa isu—dan kita dapat menambahkan beberapa identitas dan nilai—yang

diorganisir ke dalam politik, sementara yang lain diorganisir di luar. Dengan kata lain, pergeseran dari masyarakat ke politik terjadi ketika pembelahan sosial tertentu berasosiasi dengan seperangkat nilai atau identitas tertentu, ketika ini kemudian dibawa ke dunia politik dan dijadikan relevan secara politik, dengan sarana partai atau kelompok yang terorganisir.

Teori elit bersandar kepada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas cakupannya. Pertama, sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah. Kedua, sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Mulanya teori elit politik lahir dari diskusi para ilmuwan sosial Amerika Serikat pada tahun 1950-an, antara lain Schumpeter (ekonomi), Lasswell (politik), dan C Wright Mills (sosiologi). Mereka percaya bahwa setiap masyarakat diperintah sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Mereka dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat (SP Varma, 2001; 198-200).

Konsep lain yang mesti dijelaskan dalam artikel ini adalah kiai (ulama) sebagai elit agama, sosial, kultur, dan politik dalam organisasi NU. KH Achmad Siddiq (2005), Rais Am PBNU hasil Mukhtamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo menyebut, NU menentukan dengan mantap bahwa tiang utamanya, sokoguru dan kekuatan sentralnya adalah para ulama. Hal itu didasarkan pada dua pertimbangan utama. *Pertama*, sebagai organisasi keagamaan harus memilih dan menentukan kekuatan sentralnya pada tokoh-

tokoh yang paling kuat dan paling dapat dipertanggungjawabkan jiwa, mental, ilmu, amal dan akhlak keagamaannya, yakni para ulama. *Kedua*, seorang ulama yang paling kecil lingkaran pengaruhnya pun selalu mempunyai kewibawaan dan pengaruh atas santri/muridnya dan para (bekas) santri/murid yang sudah pulang kampung dengan posisi dan potensinya masing-masing. Bahkan para ulama juga memiliki jalur kewibawaan langsung dengan masyarakat sekelilingnya, yang dapat menembus batas-batas kelompok organisasi, batas-batas kedaerahan sampai jauh ke pelosok-pelosok Tanah Air, malah bisa lebih luas daripada itu. (Siddiq, 2005; 17-18). Karena itu, NU menyimpulkan esensi keulamaan sebagai berikut: Norma pokok berhubungan dengan ketakwaannya kepada Allah SWT. Para ulama dalam pengertian dimaksud itulah yang dijadikan kekuatan sentral atau sokogurunya NU. Tidak setiap orang yang mengerti ilmu agama mendapat predikat ulama, apalagi mereka yang meng-ulama-kan diri atau di-ulama-kan dengan memperkosa pengertian ulama yang sewajarnya. (Siddiq, 2005; 24-25).

POROS LIRBOYO VS POROS TEBUIRENG

Pilgub Jatim 2018 menghadapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil E Dardak yang disokong Poros Tebuireng versus pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarnoputra yang di-back up Poros Lirboyo. Hasil akhir Pilgub Jatim 2018 adalah: 10.465.218 suara (53,55%) untuk pasangan Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti dengan 9.076.014 suara (46,45%). Total suara yang digunakan mencapai 20.323.259 suara dari total DPT yang mencapai 30.155.719 pemilih.

Hasil Pilgub Jatim 2018 juga menunjukkan, pasangan Khofifah-Emil menang di 27 kabupaten/kota di Jatim. Kemenangan Khofifah-Emil di 27 kabupaten/kota itu rata-

rata bersifat mutlak dan hanya di Kota Pasuruan, Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti meraih suara nyarisimbang, dengan kemenangan pasangan Gus Ipul-Puti. Di Kota Pasuruan ini, Gus Ipul-Puti merebut dukungan 45.842 suara dan Khofifah-Emil dengan 45.617 suara. Di titik lain, Gus Ipul-Puti kalah telak dibandingkan Khofifah-Emil di Kabupaten Pacitan. Di daerah kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, Khofifah-Emil Dardak merebut dukungan 230.087 suara, sedang Gus Ipul-Puti dengan 79.274 suara.

Kemenangan pasangan Khofifah-Emil di 27 kabupaten/kota di Jatim, antara lain: Kabupaten Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Lumajang, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Di sisi lain, 11 kabupaten/kota yang dimenangkan Gus Ipul-Puti adalah: Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Batu, Kediri, Blitar, dan Bangkalan. Bagaimana formasi sebaran suara dukungan untuk pasangan Khofifah-Emil Dardak dan Gus Ipul-Puti Guntur bisa dilihat dalam tabel II.

Persebaran suara dari kedua calon menggambarkan tentang adanya pembelahan pada suara kiai-kiai NU. Peter Mair menguraikan, pembelahan memiliki 3 karakteristik yang berbeda. Pertama, pembelahan melibatkan pembagian sosial yang membedakan antara kelompok-kelompok orang atas dasar karakteristik sosial-struktural utama, seperti agama, status, atau etnis. Kedua, harus ada kesadaran yang jelas tentang identitas kolektif yang terlibat, dalam arti kelompok-kelompok yang mendasari

pembelahan harus menyadari identitas dan kepentingan bersama mereka. Ketiga, pembelahan harus menemukan ekspresi organisasi, baik melalui partai politik, serikat pekerja, gereja, atau lembaga lain. Karena dalam pembelahan politik hampir tidak ada sesuatu yang berbeda dari konflik atau perpecahan politik dan karenanya tidak ada yang menuntut penggunaan istilah pembelahan.

Kiai atau ulama adalah komponen penting dalam NU. NU jadi kanal kelembagaan Islam kiai atau ulama berpaham Ahlussunnah Wal Jamaah dalam konteks membentengi ajaran-ajaran Islam sebagaimana digariskan ulama terdahulu. Kiai menjadi sokoguru bagi NU dengan berbagai label dan kapasitas yang melekat di dalamnya, baik dalam perspektif teologis, sosial, kultural, dan politik. Kiai jadi elit penting dan strategis dalam NU, baik dalam perspektif jam'iyah (kelembagaan organisasi) maupun jamaah (keumatan). Sedang massa NU yang populer dengan sebutan warga Nahdliyyin merupakan komunitas keagamaan (Islam) yang menjadikan kiai atau ulama sebagai patron dan rujukan utamanya, baik dalam lapangan keagamaan, sosial, kultural, dan politik.

Hasil Pilgub Jatim 2018 memperlihatkan kemungkinan mulai merosotnya pengaruh politik kiai-kiai NU yang tergabung dalam Poros Lirboyo dibanding kiai-kiai NU yang berada di kubu Poros Tebuireng. Di barisan kiai NU pada Poros Lirboyo, banyak kiai besar yang menduduki jabatan struktural di PWNU Jatim maupun PBNU, seperti KH Miftakhul Akhyar sebagai Wakil Rais Aam PBNU (Kota Surabaya), KH Mutawakkil Alallah (Kabupaten Probolinggo) sebagai Ketua PWNU Jatim, KH Agoes Ali Masyhuri (Kabupaten Sidoarjo) sebagai Wakil Syuriah NU Jatim, KH Zainuddin Jazuli (Ponpes Ploso Kediri), KH. Anwar Manshur (Ponpes Lirboyo Kota Kediri), KH

Nurul Huda Jazuli (Ponpes Ploso, Kediri), KH. Nawawi Abdul Jalil (Ponpes Sidogiri, Pasuruan), KH. Anwar Iskandar (Ponpes Al Amin, Kediri), KH. Fuad Nur Hasan (Ponpes Sidogiri, Pasuruan), KH. Fuad Jazuli (Ponpes Ploso, Kediri), KH. Idris Hamid (Ponpes Salafiyah, Kota Pasuruan), KH. Abdullah Kafabihi (Ponpes Lirboyo, Kediri), KH. Cholil As'ad Samsul Arifin (Ponpes Walisongo, Situbondo), KH Fakhri Aschal (Ponpes Syaichona Cholil, Bangkalan), dan KH. Ubaidilah Faqih (Ponpes Langitan Tuban). Dari barisan kiai NU pendukung Gus Ipul-Puti Guntur tersebut, yang terlihat pengaruhnya masih kuat di daerahnya masing-masing adalah KH. Cholil As'ad Samsul Arifin (Ponpes Walisongo, Situbondo). Hal itu dibuktikan dengan kemenangan cukup telak pasangan Gus Ipul-Puti Guntur atas Khofifah-Emil Dardak, dengan raihan dukungan 172.048 suara untuk pasangan Gus Ipul-Puti Guntur dan 138.174 suara untuk pasangan Khofifah-Emil Dardak.

Kabupaten Bangkalan, yang mana pasangan Gus Ipul-Puti Guntur memperoleh dukungan politik KH Fakhri Aschal dari Ponpes Syaichona Cholil, Bangkalan unggul tak terlalu tajam dibanding pasangan Khofifah-Emil Dardak. Gus Ipul-Puti Guntur memperoleh dukungan 271.088 suara, sedang Khofifah-Emil Dardak dengan 261.467 suara.

Di Kabupaten/kota lainnya yang menjadi daerah asal kiai khos NU pendukung Gus Ipul-Puti Guntur, pasangan ini memang meraih kemenangan. Tapi, tingkat kemenangannya tak bersifat mutlak. Gus Ipul-Puti Guntur hanya menang tipis-tipis, seperti di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Kediri. Di Kota Kediri yang menjadi lokasi 3 ponpes besar pendukung pasangan Gus Ipul-Puti Guntur, yakni Pondok Lirboyo, Pondok Ploso, dan Pondok Al Amin pimpinan KH Anwar Iskandar,

pasangan ini tak mampu mengalahkan pasangan Khofifah-Emil Dardak. Kemenangan pasangan Gus Ipul-Puti Guntur di Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kota Madiun lebih merujuk pada kenyataan historis-politik bahwa wilayah politik tersebut di atas selama ini dikenal sebagai kandang komunitas politik Nasionalis-Soekarnoisme. Khusus kemenangan Gus Ipul-Puti Guntur di Kabupaten Malang, pengaruh pimpinan Pondok An Nuur Bululawang, KH Fahrur Rozi yang dikenal sebagai sahabat kental Gus Ipul, tak mungkin dinafikan. Pondok An Nuur merupakan salah satu lembaga pendidikan agama komunitas Islam Tradisional yang cukup besar di Malang dan memiliki ribuan santri dari kawasan Malang dan daerah lainnya di Indonesia.

Di sebagian besar kawasan Tapal Kuda Jatim, yakni 4 kabupaten di Pulau Madura plus Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Jember, sebagian besar wilayah-wilayah tersebut dimenangkan pasangan Khofifah-Emil Dardak. Pasangan Gus Ipul-Puti Guntur hanya menang di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten/Kota Pasuruan, dan Kabupaten Situbondo. Padahal di kawasan ini banyak berkonsentrasi sejumlah pondok besar yang kiainya jadi pendukung Gus Ipul-Puti, seperti sejumlah pondok di Kota/Kabupaten Pasuruan dan Kota/Kabupaten Probolinggo. Bahkan, saat masa kampanye, pasangan Gus Ipul-Puti Guntur sempat menggelar kampanye akbar di Kabupaten Jember, tapi di daerah yang dipimpin Bupati dokter Faida ini, pasangan Khofifah-Emil Dardak unggul atas pasangan Gus Ipul-Puti Guntur. Selain itu, walaupun Gus Ipul sempat berpasangan dengan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), tapi di wilayah ujung timur Jatim tersebut, pasangan Gus Ipul-Puti Guntur kalah cukup telak atas pasangan Khofifah-

Emil Dardak (Data selengkapnya lihat tabel II). Di sebagian besar kawasan Tapal Kuda, pasangan Khofifah-Emil Dardak unggul di Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Lumajang.

Pun demikian di sejumlah kawasan di Mataraman Jatim, seperti Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan Kota Kediri, pasangan Khofifah-Emil Dardak menang cukup telak atas pasangan Gus Ipul-Puti Guntur. Padahal, sejumlah daerah itu di bawah kepemimpinan bupati-wakil bupati yang diukung PDIP, seperti Tulungagung, Trenggalek, Magetan, dan Nganjuk. Kota Surabaya yang selama ini jadi kandang terkuat kaum Nasionalis di Kota Besar selain kabupaten/kota lainnya di kawasan Mataraman, di Pilgub Jatim 2018 juga tak bisa diharapkan banyak bisa menyokong suara untuk pasangan Gus Ipul-Puti Guntur. Di Kota Pahlawan ini, justru pasangan Khofifah-Emil Dardak unggul tipis atas pasangan Gus Ipul-Puti Guntur, sekalipun Wali Kota Tri Rismaharini telah terjun langsung dan bekerja all out memenangkan pasangan Gus Ipul-Puti Guntur.

Tabel 2.
Raihan Dukungan Suara Khofifah Indar Parawansa-Emil E Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputra di Pilgub Jatim 2018

No	Kota / Kabupaten	Khofifah - Emil	Gus Ipul - Puti
1	Bangkalan	261467	271088
2	Banyuwangi	410547	394480
3	Blitar	288645	317425
4	Bojonegoro	398617	351556
5	Bondowoso	242761	192455
6	Gresik	345598	251351
7	Jember	555577	402998
8	Jombang	326596	319896
9	Kediri	388998	407623
10	Kota Batu	53269	54928
11	Kota Blitar	31039	46716
12	Kota Kediri	75522	73998

13	Kota Madiun	50349	52972
14	Kota Malang	199054	180818
15	Kota Mojokerto	40482	32609
16	Kota Pasuruan	45617	45842
17	Kota Probolinggo	69446	55170
18	Kota surabaya	579246	560848
19	Lamongan	346260	281176
20	Lumajang	302072	270849
21	Madiun	196671	207799
22	Magetan	189442	188988
23	Malang	588727	621650
24	Mojokerto	321490	229653
25	Nganjuk	327234	233401
26	Ngawi	242639	221289
27	Pacitan	230087	79274
28	Pamekasan	343494	136684
29	Pasuruan	331225	383660
30	Ponorogo	287670	199484
31	Probolinggo	331939	260066
32	Sampang	339222	312331
33	Sidoarjo	477746	377313
34	Situbodo	138174	172048
35	Sumenep	248074	240683
36	Trenggalek	266008	120118
37	Tuban	289615	236343
38	Tulungagung	304149	290498
	Total Jumlah Suara	10.465.218	9.076.014

Sumber Data: KPU Provinsi Jatim (2018)

KESIMPULAN

Apakah pengaruh kiai-kiai NU mulai meredup? Tak mudah memberikan jawaban pasti atas pertanyaan penting ini. Sebab, *pertama*, di kubu pasangan Gus Ipul-Puti Guntur yang disokong banyak kiai NU struktural dengan *back ground* pondok besar yang mereka pimpin ternyata tak mampu merebut dan mengoleksi suara signifikan bagi pasangan Gus Ipul-Puti Guntur. Hanya di Kabupaten Situbondo, di mana Pondok Walisongo pimpinan KH Cholil As'ad Syamsul Arifin berada, pasangan Gus Ipul-Puti Guntur mampu merebut suara besar dan perbedaan raihan suaranya

dengan pasangan Khofifah-Emil Dardak cukup signifikan. Jabatan struktural di NU, baik di tingkat PWNU Jatim maupun PBNU, ternyata tak memberikan political influence besar bagi pasangan Gus Ipul-Puti Guntur dalam konteks Pilgub Jatim 2018 lalu.

Kedua, dari sejumlah kiai pendukung pasangan Khofifah-Emil Dardak, hanya KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) pimpinan Pondok Tebuireng Jombang dan KH Asep Syaifuddin Halim (Gus Asep), pimpinan Pondok Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang paling dikenal publik dan pernyataan-pernyataannya seringkali dikutip media massa. Kedua kiai ini tak memiliki jabatan struktural di PWNU Jatim maupun PBNU. Sedang kiai NU lainnya yang merapat ke kubu Khofifah-Emil Dardak umumnya tak sedang memangku jabatan struktural di PWNU Jatim maupun PBNU. Namun demikian, kemungkinan besar pengaruh mereka di kalangan pemilih NU di tingkat akar rumput ternyata lebih kuat dan menyebar dibanding dengan kiai-kiai NU struktural yang banyak merapat ke kubu Gus Ipul-Puti Guntur. Kondisi ini tak mungkin juga dilepaskan pengaruh dari faktor lain, seperti ketokohan Khofifah-Emil Dardak, dukungan partai pengusung, dukungan Soekarwo (Pakde Karwo) sebagai gubernur Jatim petahana, dukungan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan presiden RI yang berasal dari Pacitan (Jatim), dan faktor-faktor lainnya.

Ketiga, hasil Pilgub Jatim 2018 menegaskan bahwa jabatan struktural di organisasi NU dari kiai pendukung satu pasangan cagub-cawagub tidak bisa menjadi garansi politik bersifat otomatis dan mekanis bakal menggerek raihan dukungan suara dari pemilih, khususnya dari pemilih kalangan Islam Tradisional, terhadap pasangan cagub-cawagub bersangkutan. Pilgub Jatim secara langsung sebagai breakdown

demokrasi electoral terlalu disimplikasikan sekiranya faktor kiai semata yang bisa dijadikan garansi politik untuk merebut suara signifikan di akar rumput. Di Jatim, volume pemilih tradisional yang perilaku politiknya bersifat paternalistik dan menempatkan relasi kiai-santri sebagai patron-client tetap tinggi. Di sisi lain, pemilih rasional bahkan pragmatis juga tak kalah banyaknya. Konfigurasi karakter politik pemilih yang beragam mengharuskan dilibatkannya banyak faktor politik dalam konteks mempersuasi massa dan merebut suara dari konstituen. Hasil Pilgub Jatim 2018 sekaligus menegaskan satu hal penting bahwa pengaruh kiai kultural di tingkat akar rumput tak kalah penting dan strategis nilainya selain kiai struktural di level kepemimpinan NU. (***)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kartodirdjo, Sartono. *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Keller, Suzanne. *Penguasa dan Kelompok Elit*. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- KH Achmad Siddiq: *Khittah Nahdliyyah*. Khalista, 2005
- Nurhasim, Moch. *Konflik antar Eli Politik Lokal (Dalam Pemilihan Kepala Daerah)*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, Bandung: Penerbit Nusa Media Bekerja Sama dengan Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP) Jakarta, 2014
- TB Bottomore. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004
- Varma, SP. *Teori Politik Modern*. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Zuhro, R Siti, dkk. *Model Demokrasi Lokal (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali)*. PT THC Mandiri, 2011.

Media Massa:

http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/300803/anggaran_kpu_rp_817_m_untuk_pilgu_b_jatim_2018.html

Wawancara :

Wawancara dengan KH Anwar Iskandar pada 4 Mei 2018